

# PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

Jl. Parasamya, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55511  
Telepon (0274) 868405, Faximile (0274) 868945  
Email : [pemdasleman@slemankab.go.id](mailto:pemdasleman@slemankab.go.id), Website ://[www.slemankab.go.id](http://www.slemankab.go.id)

## PENGUMUMAN

Nomor : 810/01779

### TENTANG

### PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) DAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) TENAGA KESEHATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN FORMASI TAHUN 2021

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 625 Tahun 2021 Tanggal 21 April 2021 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Kabupaten Sleman membuka kesempatan bagi Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk mengisi formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tenaga Kesehatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman dengan ketentuan sebagaimana pengumuman ini.

#### I. ALOKASI FORMASI

##### A. Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)

FORMASI	ALOKASI FORMASI		
	UMUM	KHUSUS DISABILITAS	JUMLAH
Tenaga Kesehatan	76	1	77
Tenaga Teknis	78	3	81

##### B. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

FORMASI	ALOKASI FORMASI
Tenaga Kesehatan	4

#### II. RINCIAN PENGUMUMAN

- Rincian Pengumuman (Formasi dan Persyaratan **CPNS**) sebagaimana **Lampiran I** pengumuman ini.
- Rincian Pengumuman (Formasi dan Persyaratan **PPPK Tenaga Kesehatan**) sebagaimana **Lampiran II** pengumuman ini.

### III. JADWAL SELEKSI

No	Kegiatan	Jadwal
1.	Pengumuman Seleksi ASN	30 Juni - 14 Juli 2021
2.	Pendaftaran Seleksi ASN	30 Juni - 21 Juli 2021
3.	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	28 s.d. 29 Juli 2021
4.	Masa Sanggah	30 Juli s.d. 1 Agustus 2021
5.	Jawab Sanggah	30 Juli s.d. 8 Agustus 2021
6.	Pengumuman Pasca Sanggah	9 Agustus 2021
7.	Pelaksanaan SKD	25 Agustus s.d. 4 Oktober 2021
8.	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi PPPK Nonguru	Setelah pelaksanaan SKD selesai di masing-masing titik
9.	Pengumuman Hasil SKD	17 s.d. 18 Oktober 2021
10.	Persiapan Pelaksanaan SKB	19 Oktober s.d. 1 November 2021
11.	Pelaksanaan SKB	8 s.d. 29 November 2021
12.	Penyampaian Hasil Integrasi SKD dan SKB serta Seleksi PPPK Nonguru	15 s.d. 17 Desember 2021
13.	Pengumuman Kelulusan	18 s.d. 19 Desember 2021
14.	Masa Sanggah	20 s.d. 22 Desember 2021
15.	Jawab Sanggah	20 s.d. 29 Desember 2021
16.	Pengumuman Pasca Sanggah	30 s.d. 31 Desember 2021
17.	Pengisian DRH	1 s.d. 18 Januari 2022
18.	Usul Penetapan NIP/NI PPPK	19 Januari s.d. 18 Februari 2022

### IV. PENDAFTARAN

1. Pendaftaran dilakukan secara daring (Online) melalui SSCASN dengan terlebih dahulu membuat akun dan disertai dengan proses pengunggahan dokumen yang dipersyaratkan secara elektronik.
2. Pembuatan akun hanya dapat dilakukan sebanyak 1 (satu) kali di awal pembukaan seleksi ASN tahun 2021.
3. Pelamar hanya dapat melamar pada 1 (satu) jenis jalur kebutuhan ASN yaitu:
  - a. CPNS; atau
  - b. PPPK,pada tahun anggaran 2021.
4. Dalam hal pelamar diketahui melamar:
  - a. lebih dari 1 (satu) instansi dan/atau 1 (satu) jenis Jabatan dan/atau jenis jalur kebutuhan PNS; atau
  - b. menggunakan 2 (dua) nomor identitas kependudukan yang berbeda, yang bersangkutan dianggap gugur dan/atau dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### V. PELAKSANAAN PENGADAAN

Pelaksanaan pengadaan ASN Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2021 berpedoman pada:

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional;
3. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 625 Tahun 2021 Tanggal 21 April 2021 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2021;
4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 980 Tahun 2021 tentang Persyaratan Surat Tanda Registrasi untuk Melamar pada Jabatan Fungsional Kesehatan dalam dalam Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2021;
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 981 Tahun 2021 tentang Persyaratan, Sertifikasi dan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan untuk Melamar pada Jabatan Fungsional dalam Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2021;
6. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 5587/B-KS.04.01/SD/K/2021 tanggal 28 Juni 2021 Perihal : Jadwal Pelaksanaan Seleksi Penerimaan CPNS dan PPPK Non Guru Tahun 2021.

## **VI. KETENTUAN LAIN**

1. Pelamar harus membaca dengan cermat pengumuman, memenuhi semua persyaratan dan melakukan pendaftaran sesuai dengan tata cara yang termuat dalam pengumuman;
2. Panitia tidak bertanggungjawab terhadap dokumen unggah yang tidak dapat dibaca dengan jelas dan/atau data tidak sesuai dengan dokumen yang diunggah. Hal tersebut dapat mengakibatkan peserta tidak lulus administrasi dan merupakan kelalaian peserta;
3. Dihimbau agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu (calo) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk lain;
4. Pemerintah Kabupaten Sleman tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun dari oknum-oknum yang mengatasnamakan Tim Pengadaan ASN Tahun 2021, sehingga peserta diharapkan tidak melayani tawaran untuk mempermudah penerimaan sebagai CPNS/PPPK Tahun 2021.
5. Kelulusan peserta merupakan hasil/prestasi peserta sendiri. Apabila diketahui dan dapat dibuktikan bahwa kelulusannya karena kecurangan/pelanggaran, maka akan diproses sesuai hukum yang berlaku dan digugurkan kelulusannya.
6. Informasi resmi yang terkait dengan seleksi dapat dilihat di website <https://sscasn.bkn.go.id> atau [www.slemankab.go.id](http://www.slemankab.go.id) atau <https://bkpp.slemankab.go.id>;
7. Para calon pelamar/pelamar untuk selalu memantau website tersebut pada angka 6 untuk melihat pengumuman penting lainnya serta waktu dan tempat pelaksanaan ujian.
8. Untuk mengikuti seluruh seleksi Tahun 2021, para pelamar **TIDAK DIPUNGUT BIAYA** apapun.
9. Keputusan Tim Panitia Seleksi Tahun 2021 tidak dapat diganggu gugat dan bersifat mutlak.

10. **Informasi pelaksanaan seleksi CPNS/PPPK Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2021, melalui :**

- a. Helpdesk <https://helpdesk-sscasn.bkn.go.id> (tautan aduan pelamar yang mengalami kendala dalam pendaftaran);
- b. Helpdesk e-mail : [helpdeskcpns@slemankab.go.id](mailto:helpdeskcpns@slemankab.go.id).

Sleman, 30 Juni 2021

a.n. BUPATI SLEMAN

SEKRETARIS DAERAH

Selaku Ketua Panitia Seleksi Daerah

Pengadaan ASN Tahun 2021



H. HARDA KISWAYA, SE., M.Si

Pembina Utama Madya, IV/d

NIP. 19640126 199303 1 004

## LAMPIRAN I

## RINCIAN FORMASI DAN PERSYARATAN

## PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

**A. RINCIAN FORMASI**

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	KETERANGAN TAMBAHAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI	UNIT KERJA PENEMPATAN
1	2	3	4	5	6
	<b>JUMLAH KESELURUHAN</b>			<b>158</b>	
<b>A.</b>	<b>FORMASI KHUSUS BAGI PENYANDANG DISABILITAS</b>			<b>4</b>	
1	TERAMPIL - INSTRUKTUR	S-1 TATA BUSANA/S-1 TEKNIK ELEKTRO/S-1 BOGA	-	1	DINAS TENAGA KERJA
2	TERAMPIL - PENGAWAS BIBIT TERNAK	D-III PETERNAKAN	D-III PETERNAKAN TERMASUK DI DALAMNYA D-III BUDIDAYA TERNAK, D-III PRODUKSI TERNAK, D-III TEKNOLOGI DAN MANAJEMEN TERNAK	1	DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN
3	TERAMPIL - PENGAWAS MUTU PAKAN	D-III PETERNAKAN	D-III PETERNAKAN TERMASUK DI DALAMNYA D-III BUDIDAYA TERNAK, D-III PRODUKSI TERNAK, D-III TEKNOLOGI DAN MANAJEMEN TERNAK	1	DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN
4	TERAMPIL - RADIOGRAFER	D-III RADIOLOGI / D-III TEKNIK RONTGEN / D-III RADIODIAGNOSTIK	-	1	RSUD SLEMAN
<b>B.</b>	<b>FORMASI UMUM</b>				
<b>B.1</b>	<b>TENAGA KESEHATAN</b>			<b>76</b>	
1	AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI	DOKTER GIGI	-	1	UPT PUSKESMAS MLATI II
2	AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI	DOKTER GIGI	-	1	UPT PUSKESMAS NGEMPLAK II
3	AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI	DOKTER GIGI	-	1	UPT PUSKESMAS DEPOK I
4	AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS JANTUNG	SPESIALIS JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH	-	1	RSUD SLEMAN
5	AHLI PERTAMA - PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT	D-IV KESEHATAN MASYARAKAT / S-1 KESEHATAN MASYARAKAT	-	1	UPT PUSKESMAS NGAGLIK I
6	AHLI PERTAMA - PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT	D-IV KESEHATAN MASYARAKAT / S-1 KESEHATAN MASYARAKAT	-	1	UPT PUSKESMAS DEPOK III
7	AHLI PERTAMA - PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT	D-IV KESEHATAN MASYARAKAT / S-1 KESEHATAN MASYARAKAT	-	1	UPT PUSKESMAS NGEMPLAK II
8	AHLI PERTAMA - PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT	D-IV KESEHATAN MASYARAKAT / S-1 KESEHATAN MASYARAKAT	-	1	UPT PUSKESMAS MLATI I
9	AHLI PERTAMA - PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT	D-IV KESEHATAN MASYARAKAT / S-1 KESEHATAN MASYARAKAT	-	1	UPT PUSKESMAS MINGGIR
10	AHLI PERTAMA - PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT	D-IV KESEHATAN MASYARAKAT / S-1 KESEHATAN MASYARAKAT	-	1	UPT PUSKESMAS NGEMPLAK I
11	AHLI PERTAMA - PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT	D-IV KESEHATAN MASYARAKAT / S-1 KESEHATAN MASYARAKAT	-	1	UPT PUSKESMAS GODEAN II

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	KETERANGAN TAMBAHAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI	UNIT KERJA PENEMPATAN
1	2	3	4	5	6
12	AHLI PERTAMA - PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT	D-IV KESEHATAN MASYARAKAT / S-1 KESEHATAN MASYARAKAT	-	1	UPT PUSKESMAS DEPOK II
13	AHLI PERTAMA - PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT	D-IV KESEHATAN MASYARAKAT / S-1 KESEHATAN MASYARAKAT	-	1	UPT PUSKESMAS BERBAH
14	AHLI PERTAMA - PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT	D-IV KESEHATAN MASYARAKAT / S-1 KESEHATAN MASYARAKAT	-	1	UPT PUSKESMAS MOYUDAN
15	AHLI PERTAMA - PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT	D-IV KESEHATAN MASYARAKAT / S-1 KESEHATAN MASYARAKAT	-	1	UPT PUSKESMAS GAMPING II
16	AHLI PERTAMA - PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT	D-IV KESEHATAN MASYARAKAT / S-1 KESEHATAN MASYARAKAT	-	1	UPT PUSKESMAS KALASAN
17	AHLI PERTAMA - SANITARIAN	S-1 KESEHATAN LINGKUNGAN / D-IV SANITASI/KESEHATAN LINGKUNGAN	-	1	UPT PUSKESMAS MLATI I
18	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	D-III FARMASI	-	1	UPT PUSKESMAS CANGKRINGAN
19	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	D-III FARMASI	-	1	UPT PUSKESMAS TEMPEL II
20	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	D-III FARMASI	-	1	UPT PUSKESMAS DEPOK III
21	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	D-III FARMASI	-	1	UPT PUSKESMAS TEMPEL I
22	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	D-III FARMASI	-	1	UPT PUSKESMAS DEPOK II
23	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	D-III FARMASI	-	1	UPT PUSKESMAS NGEMPLAK I
24	TERAMPIL - BIDAN	D-III KEBIDANAN	-	3	UPT PUSKESMAS GODEAN II
25	TERAMPIL - BIDAN	D-III KEBIDANAN	-	1	UPT PUSKESMAS GAMPING II
26	TERAMPIL - BIDAN	D-III KEBIDANAN	-	1	UPT PUSKESMAS DEPOK I
27	TERAMPIL - BIDAN	D-III KEBIDANAN	-	4	UPT PUSKESMAS TEMPEL I
28	TERAMPIL - BIDAN	D-III KEBIDANAN	-	1	UPT PUSKESMAS NGAGLIK I
29	TERAMPIL - BIDAN	D-III KEBIDANAN	-	1	UPT PUSKESMAS TURI
30	TERAMPIL - BIDAN	D-III KEBIDANAN	-	1	UPT PUSKESMAS DEPOK II
31	TERAMPIL - EPIDEMIOLOG KESEHATAN	D-III KESEHATAN LINGKUNGAN / D-III SANITASI LINGKUNGAN	-	1	UPT PUSKESMAS MLATI II
32	TERAMPIL - EPIDEMIOLOG KESEHATAN	D-III KESEHATAN LINGKUNGAN / D-III SANITASI LINGKUNGAN	-	1	UPT PUSKESMAS TEMPEL I
33	TERAMPIL - EPIDEMIOLOG KESEHATAN	D-III KESEHATAN LINGKUNGAN / D-III SANITASI LINGKUNGAN	-	1	UPT PUSKESMAS NGEMPLAK II
34	TERAMPIL - EPIDEMIOLOG KESEHATAN	D-III KESEHATAN LINGKUNGAN / D-III SANITASI LINGKUNGAN	-	1	UPT PUSKESMAS MOYUDAN
35	TERAMPIL - EPIDEMIOLOG KESEHATAN	D-III KESEHATAN LINGKUNGAN / D-III SANITASI LINGKUNGAN	-	1	UPT PUSKESMAS BERBAH

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	KETERANGAN TAMBAHAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI	UNIT KERJA PENEMPATAN
1	2	3	4	5	6
36	TERAMPIL - EPIDEMIOLOG KESEHATAN	D-III KESEHATAN LINGKUNGAN / D-III SANITASI LINGKUNGAN	-	1	UPT PUSKESMAS GAMPING II
37	TERAMPIL - EPIDEMIOLOG KESEHATAN	D-III KESEHATAN LINGKUNGAN / D-III SANITASI LINGKUNGAN	-	1	UPT PUSKESMAS CANGKRINGAN
38	TERAMPIL - NUTRISIONIS	D-III GIZI	-	1	UPT PUSKESMAS NGAGLIK I
39	TERAMPIL - PERAWAT	D-III KEPERAWATAN	-	3	UPT PUSKESMAS NGEMPLAK I
40	TERAMPIL - PERAWAT	D-III KEPERAWATAN	-	1	UPT PUSKESMAS DEPOK I
41	TERAMPIL - PERAWAT	D-III KEPERAWATAN	-	1	UPT PUSKESMAS GAMPING II
42	TERAMPIL - PERAWAT	D-III KEPERAWATAN	-	3	UPT PUSKESMAS NGAGLIK I
43	TERAMPIL - PERAWAT	D-III KEPERAWATAN	-	2	UPT PUSKESMAS GODEAN I
44	TERAMPIL - PERAWAT	D-III KEPERAWATAN	-	1	UPT PUSKESMAS TEMPEL I
45	TERAMPIL - PERAWAT	D-III KEPERAWATAN	-	1	UPT PUSKESMAS MOYUDAN
46	TERAMPIL - PERAWAT	D-III KEPERAWATAN	-	2	UPT PUSKESMAS BERBAH
47	TERAMPIL - PERAWAT	D-III KEPERAWATAN	-	1	UPT PUSKESMAS SEYEGAN
48	TERAMPIL - TERAPIS GIGI DAN MULUT	D-III KEPERAWATAN GIGI	-	1	UPT PUSKESMAS GAMPING I
49	TERAMPIL - TERAPIS GIGI DAN MULUT	D-III KEPERAWATAN GIGI	-	2	UPT PUSKESMAS PRAMBANAN
50	TERAMPIL - TERAPIS GIGI DAN MULUT	D-III KEPERAWATAN GIGI	-	1	UPT PUSKESMAS NGAGLIK II
51	TERAMPIL - TERAPIS GIGI DAN MULUT	D-III KEPERAWATAN GIGI	-	1	UPT PUSKESMAS SLEMAN
52	TERAMPIL - TERAPIS GIGI DAN MULUT	D-III KEPERAWATAN GIGI	-	1	UPT PUSKESMAS MLATI II
53	TERAMPIL - TERAPIS GIGI DAN MULUT	D-III KEPERAWATAN GIGI	-	1	UPT PUSKESMAS DEPOK I
54	TERAMPIL - TERAPIS GIGI DAN MULUT	D-III KEPERAWATAN GIGI	-	1	UPT PUSKESMAS TURI
55	TERAMPIL - PEREKAM MEDIS	D-III REKAM MEDIK / D-III PEREKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN	BERASAL DARI PRODI REKAM MEDIK/ PEREKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN, BUKAN KONSENTRASI REKAM MEDIK DAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN	1	UPT PUSKESMAS SEYEGAN
56	TERAMPIL - PEREKAM MEDIS	D-III REKAM MEDIK / D-III PEREKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN	BERASAL DARI PRODI REKAM MEDIK/ PEREKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN, BUKAN KONSENTRASI REKAM MEDIK DAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN	1	UPT PUSKESMAS GODEAN II
57	TERAMPIL - PEREKAM MEDIS	D-III REKAM MEDIK / D-III PEREKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN	BERASAL DARI PRODI REKAM MEDIK/ PEREKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN, BUKAN KONSENTRASI REKAM MEDIK DAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN	1	UPT PUSKESMAS MOYUDAN
58	TERAMPIL - PEREKAM MEDIS	D-III REKAM MEDIK / D-III PEREKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN	BERASAL DARI PRODI REKAM MEDIK/ PEREKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN, BUKAN KONSENTRASI REKAM MEDIK DAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN	1	UPT PUSKESMAS GAMPING I

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	KETERANGAN TAMBAHAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI	UNIT KERJA PENEMPATAN
1	2	3	4	5	6
59	TERAMPIL - PEREKAM MEDIS	D-III REKAM MEDIK / D-III PEREKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN	BERASAL DARI PRODI REKAM MEDIK/ PEREKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN, BUKAN KONSENTRASI REKAM MEDIK DAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN	1	UPT PUSKESMAS GAMPING II
60	TERAMPIL - PEREKAM MEDIS	D-III REKAM MEDIK / D-III PEREKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN	BERASAL DARI PRODI REKAM MEDIK/ PEREKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN, BUKAN KONSENTRASI REKAM MEDIK DAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN	1	UPT PUSKESMAS PRAMBANAN
61	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	D-III ANALIS KESEHATAN	-	1	UPT PUSKESMAS SEYEGAN
62	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	D-III ANALIS KESEHATAN	-	1	RSUD SLEMAN
63	TERAMPIL - RADIOGRAFER	D-III RADIOLOGI / D-III TEKNIK RONTGEN / D-III RADIODIAGNOSTIK	-	1	RSUD SLEMAN
64	TERAMPIL - SANITARIAN	D-III KESEHATAN LINGKUNGAN / D-III SANITASI LINGKUNGAN / D-III KESEHATAN SANITASI	-	1	UPT PUSKESMAS NGAGLIK II
<b>B.2</b>	<b>TENAGA TEKNIS</b>			<b>78</b>	
1	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	S-1 KEARSIPAN / D-IV KEARSIPAN	-	1	DINAS KESEHATAN
2	AHLI PERTAMA - AUDITOR	S-1 EKONOMI AKUNTANSI	-	1	INSPEKTORAT
3	AHLI PERTAMA - MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL	S-1 ILMU HUKUM	-	1	DINAS TENAGA KERJA
4	AHLI PERTAMA - PENGAWAS BIBIT TERNAK	S-1 PETERNAKAN	-	1	DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN
5	TERAMPIL - ARSIPARIS	D-III KEARSIPAN	-	1	INSPEKTORAT
6	TERAMPIL - ARSIPARIS	D-III KEARSIPAN	-	1	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
7	TERAMPIL - ARSIPARIS	D-III KEARSIPAN	-	1	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
8	TERAMPIL - INSTRUKTUR	S-1 TATA BUSANA/S-1 TEKNIK ELEKTRO/S-1 BOGA	-	2	DINAS TENAGA KERJA
9	TERAMPIL - PENGAWAS BIBIT TERNAK	D-III PETERNAKAN	D-III PETERNAKAN TERMASUK DI DALAMNYA D-III BUDIDAYA TERNAK, D-III PRODUKSI TERNAK, D-III TEKNOLOGI DAN MANAJEMEN TERNAK	1	DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN
10	TERAMPIL - PENGAWAS MUTU PAKAN	D-III PETERNAKAN	D-III PETERNAKAN TERMASUK DI DALAMNYA D-III BUDIDAYA TERNAK, D-III PRODUKSI TERNAK, D-III TEKNOLOGI DAN MANAJEMEN TERNAK	1	DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN



NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	KETERANGAN TAMBAHAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI	UNIT KERJA PENEMPATAN
1	2	3	4	5	6
11	ANALIS BANGUNAN DAN PERUMAHAN	S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN / S-1 ARSITEKTUR / S-1 TEKNIK SIPIL	-	1	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN   BIDANG PERUMAHAN   SEKSI PERUMAHAN SWADAYA
12	ANALIS BANGUNAN DAN PERUMAHAN	S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN / S-1 ARSITEKTUR / S-1 TEKNIK SIPIL	-	1	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN   BIDANG CIPTA KARYA   SEKSI PRASARANA DAN SARANA DASAR PEMUKIMAN
13	ANALIS BANGUNAN GEDUNG DAN PERMUKIMAN	S-1 TEKNIK SIPIL / S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN	-	1	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN   BIDANG CIPTA KARYA   SEKSI BANGUNAN GEDUNG
14	ANALIS DATA INTELIJEN	S-1 KRIMINOLOGI / S-1 HUKUM / S-1 TEKNOLOGI INFORMATIKA / S-1 MANAJEMEN TEKNIK INFORMATIKA / S-1 SOSIAL POLITIK / S-1 SISTEM INFORMASI	-	1	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK   BIDANG PENANGANAN KONFLIK DAN KEWASPADAAN NASIONAL   SUB BIDANG PENANGANAN KONFLIK
15	ANALIS DESA DAN KELURAHAN	S-1 SOSIAL POLITIK PEMERINTAHAN / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 KEBIJAKAN PUBLIK / S-1 MANAJEMEN	-	1	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA   BIDANG ADMINISTRASI, KEUANGAN DAN ASET DESA   SEKSI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
16	ANALIS INVESTASI DAN PERMODALAN USAHA	S-1 ILMU EKONOMI STUDI PEMBANGUNAN / S-1 ILMU EKONOMI / S-1 EKONOMI MANAJEMEN	TERMASUK DI DALAMNYA S-1 EKONOMI/S-1 MANAJEMEN	1	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU   BIDANG PENANAMAN MODAL   SEKSI PENGENDALIAN DAN EVALUASI PENANAMAN MODAL
17	ANALIS INVESTASI DAN PERMODALAN USAHA	S-1 ILMU EKONOMI STUDI PEMBANGUNAN / S-1 ILMU EKONOMI / S-1 EKONOMI MANAJEMEN	TERMASUK DI DALAMNYA S-1 EKONOMI/S-1 MANAJEMEN	1	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU   BIDANG PERIZINAN USAHA   SEKSI IZIN USAHA PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
18	ANALIS KEOLAHRAGAAN	S-1 ILMU KEOLAHRAGAAN	-	1	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA   BIDANG PEMBINAAN OLAHRAGA   SEKSI PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA PRESTASI DAN REKREASI
19	ANALIS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	S-1 STATISTIKA / S-1 GEOGRAFI DAN ILMU LINGKUNGAN / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK	S-1 ILMU PEMERINTAHAN TERMASUK DI DALAMNYA S-1 POLITIK DAN PEMERINTAHAN	1	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL   BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK   SEKSI PINDAH DATANG DAN PENDATAAN PENDUDUK

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	KETERANGAN TAMBAHAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI	UNIT KERJA PENEMPATAN
1	2	3	4	5	6
20	ANALIS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	S-1 STATISTIKA / S-1 GEOGRAFI DAN ILMU LINGKUNGAN / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK	S-1 ILMU PEMERINTAHAN TERMASUK DI DALAMNYA S-1 POLITIK DAN PEMERINTAHAN	1	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL   BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PEMANFAATAN DATA   SEKSI PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
21	ANALIS KESEJAHTERAAN KELUARGA	S-1 SOSIOLOGI / S-1 PSIKOLOGI / S-1 PEMBANGUNAN SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN / S-1 EKONOMI MANAJEMEN	S-1 PEMBANGUNAN SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN TERMASUK DI DALAMNYA S-1 ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL	1	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA   BIDANG KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA   SEKSI PEMBERDAYAAN KELUARGA SEJAHTERA DAN KEMITRAAN
22	ANALIS LINGKUNGAN HIDUP	S-1 GEOGRAFI LINGKUNGAN / S-1 TEKNIK LINGKUNGAN / S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN	-	1	DINAS LINGKUNGAN HIDUP   BIDANG KEBERSIHAN DAN PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU   SEKSI PENGELOLAAN AIR LIMBAH
23	ANALIS MUTU PENDIDIKAN	S-1 MANAJEMEN PENDIDIKAN / S-1 ADMINISTRASI PENDIDIKAN	-	1	DINAS PENDIDIKAN   BIDANG PEMBINAAN SD   SEKSI KURIKULUM SD
24	ANALIS OBJEK WISATA	S-1 MANAJEMEN PARIWISATA / S-1/D-IV PARIWISATA	-	1	DINAS PARIWISATA   BIDANG PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF   SEKSI ATRAKSI WISATA DAN EKONOMI KREATIF
25	ANALIS PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	S-1 EKONOMI AKUNTANSI / S-1 EKONOMI MANAJEMEN / S-1 ILMU EKONOMI	-	1	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH   BIDANG PENDAFTARAN, PENDATAAN DAN PENETAPAN   SUB BIDANG PENDAFTARAN
26	ANALIS PANGAN	S-1 TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN / S-1 TEKNOLOGI PANGAN	TERMASUK DIDALAMNYA S-1 ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN / S-1 EKONOMI PERTANIAN DAN AGRIBISNIS	1	DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN   BIDANG KETAHANAN PANGAN   SEKSI PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN
27	ANALIS PENGAWASAN MUTU PRODUK	S-1 TEKNIK INDUSTRI	-	1	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN   BIDANG PERINDUSTRIAN   SEKSI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN INDUSTRI

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	KETERANGAN TAMBAHAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI	UNIT KERJA PENEMPATAN
1	2	3	4	5	6
28	ANALIS PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH	S-1 EKONOMI MANAJEMEN / S-1 ILMU EKONOMI / S-1 EKONOMI AKUNTANSI / S-1 ILMU EKONOMI STUDI PEMBANGUNAN	-	1	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH   BIDANG ASET   SUB BIDANG PEMANFAATAN DAN PENGAMANAN ASET
29	AHLI PERTAMA - ANALIS PERDAGANGAN	S-1 ILMU EKONOMI / S-1 EKONOMI AKUNTANSI / S-1 ILMU EKONOMI STUDI PEMBANGUNAN . S-1 ILMU EKONOMI MANAJEMEN	-	1	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN   BIDANG PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PERDAGANGAN TRADISIONAL   SEKSI PENGEMBANGAN PERDAGANGAN TRADISIONAL
30	AHLI PERTAMA - ANALIS PERDAGANGAN	S-1 ILMU EKONOMI / S-1 EKONOMI AKUNTANSI / S-1 ILMU EKONOMI STUDI PEMBANGUNAN . S-1 ILMU EKONOMI MANAJEMEN	-	1	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN   BIDANG PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PERDAGANGAN TRADISIONAL   SEKSI PEMBINAAN PERDAGANGAN TRADISIONAL
31	ANALIS PEREKENOMIAN	S-1 EKONOMI MANAJEMEN / S-1 ILMU EKONOMI / S-1 ILMU EKONOMI STUDI PEMBANGUNAN	-	1	BAGIAN PEREKENOMIAN   SUB BAGIAN KETAHANAN PANGAN
32	ANALIS PEREKENOMIAN	S-1 EKONOMI MANAJEMEN / S-1 ILMU EKONOMI / S-1 ILMU EKONOMI STUDI PEMBANGUNAN	-	1	BAGIAN PEREKENOMIAN   SUB BAGIAN POTENSI EKONOMI
33	ANALIS PERLINDUNGAN MASYARAKAT	S-1 HUKUM / S-1 ILMU HUKUM / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK	-	1	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA   BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT   SEKSI OPERASIONAL SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
34	ANALIS PRASARANA PENDIDIKAN	S-1 ADMINISTRASI PENDIDIKAN / S-1 MANAJEMEN PENDIDIKAN	-	1	DINAS PENDIDIKAN   BIDANG PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN   SEKSI SARANA DAN PRASARANA PAUD DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT
35	ANALIS PROGRAM PEMBANGUNAN	S-1 ILMU EKONOMI / S-1 ILMU EKONOMI STUDI PEMBANGUNAN	-	1	BAGIAN PEMBANGUNAN   SUB BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
36	ANALIS TATA PRAJA	S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK	-	1	PANEWU KALASAN   JAWATAN KEAMANAN

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	KETERANGAN TAMBAHAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI	UNIT KERJA PENEMPATAN
1	2	3	4	5	6
37	ANALIS TATA PRAJA	S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK	-	1	PANEWU GAMPING   JAWATAN KEAMANAN
38	ANALIS TATA PRAJA	S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK	-	1	PANEWU MLATI   JAWATAN KEAMANAN
39	ANALIS TATA PRAJA	S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK	-	1	PANEWU PAKEM   JAWATAN KEAMANAN
40	ANALIS TATA PRAJA	S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK	-	1	PANEWU NGEMPLAK   JAWATAN KEAMANAN
41	ANALIS TATA PRAJA	S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK	-	1	PANEWU MINGGIR   JAWATAN KEAMANAN
42	ANALIS TATA PRAJA	S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK	-	1	PANEWU TEMPEL   JAWATAN KEAMANAN
43	ANALIS TATA PRAJA	S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK	-	1	PANEWU DEPOK   JAWATAN KEAMANAN
44	ANALIS TATA PRAJA	S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK	-	1	PANEWU SLEMAN   JAWATAN KEAMANAN
45	ANALIS TATA RUANG	S-1 TEKNIK SIPIL / S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN / S-1 PLANOLOGI / S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA / S-1 ARSITEKTUR	-	1	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)   BIDANG TATA RUANG   SEKSI TATA BANGUNAN DAN TATA LINGKUNGAN
46	ANALIS TENAGA KERJA	S-1 PSIKOLOGI / S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA / S-1 EKONOMI MANAJEMEN / S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK / S-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK	-	1	DINAS TENAGA KERJA   BIDANG PELATIHAN DAN TRANSMIGRASI   SEKSI PELATIHAN, PRODUKTIVITAS DAN PEMAGANGAN

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	KETERANGAN TAMBAHAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI	UNIT KERJA PENEMPATAN
1	2	3	4	5	6
47	ANALIS TENAGA KERJA	S-1 PSIKOLOGI / S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA / S-1 EKONOMI MANAJEMEN / S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK / S-1 ILMU ADMINISTRASI PEBLIK	-	1	DINAS TENAGA KERJA   BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN KESEJAHTERAAN PEKERJA   SEKSI KESEJAHTERAAN PEKERJA DAN KELEMBAGAAN
48	KONSELOR	S-1 PROFESI PSIKOLOGI	-	1	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA   UPTD PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
49	PENGAWAS JALAN DAN JEMBATAN	S-1 TEKNIK SIPIL	-	1	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN   BIDANG BINA MARGA   SEKSI PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN
50	PENGAWAS JALAN DAN JEMBATAN	S-1 TEKNIK SIPIL	-	1	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN   BIDANG BINA MARGA   SEKSI PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN
51	PENGAWAS LALU LINTAS DARAT	S-1 TRANSPORTASI / D-IV TRANSPORTASI DARAT / S-1 MANAJEMEN TRANSPORTASI DARAT	-	1	DINAS PERHUBUNGAN   BIDANG LALU LINTAS   SEKSI PENGENDALIAN DAN OPERASIONAL LALU LINTAS
52	PENGAWAS MUTU HASIL PERKEBUNAN	S-1 KEHUTANAN / S-1 PERKEBUNAN / S-1 PERTANIAN	-	1	DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN   BIDANG HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN   SEKSI BINA PRODUKSI HORTIKUTURA DAN PERKEBUNAN
53	PENGAWAS MUTU PAKAN DAN PRODUKSI BIBIT TERNAK KECIL DAN UNGGAS	S-1 PETERNAKAN	-	1	DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN   BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN   SEKSI BINA PRODUKSI PETERNAKAN
54	PENGELOLA BUDIDAYA DAN PENGEMBANGAN TANAMAN PANGAN	D-III BUDIDAYA PERTANIAN / D-III ARGONOMI / D-III ARGIBISNIS	-	1	DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN   BIDANG TANAMAN PANGAN   SEKSI BINA USAHA TANAMAN PANGAN
55	PENGELOLA DOKUMEN PERIZINAN	D-III ADMINISTRASI PEMERINTAHAN / D-III EKONOMI MANAJEMEN	-	1	PANEWU NGEMPLAK   JAWATAN UMUM
56	PENGELOLA KETERSEDIAAN DAN KERAWANAN PANGAN	D-III PERTANIAN	D-III PERTANIAN TERMASUK DI DALAMNYA D-III AGROBISNIS/ D-III AGRIBISNIS	1	DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN   BIDANG KETAHANAN PANGAN   SEKSI PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	KETERANGAN TAMBAHAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI	UNIT KERJA PENEMPATAN
1	2	3	4	5	6
57	PENGELOLA KEUANGAN	D-III EKONOMI AKUNTANSI / D-III MANAJEMEN / D-III TEKNIK INFORMATIKA / D-III MANAJEMEN TEKNIK INFORMATIKA	-	1	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK   SEKRETARIAT BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK   SUB BAGIAN KEUANGAN, PERENCANAAN DAN EVALUASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
58	PENGELOLA OBAT DAN ALAT-ALAT KESEHATAN	D-III FARMASI / D-III ADMINISTRASI RUMAH SAKIT	-	1	RSUD PRAMBANAN   SEKSI PELAYANAN PENUNJANG DAN SARANA PELAYANAN KESEHATAN
59	PENGELOLA PERBENGKELAN DAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR	D-III TEKNIK MESIN	-	1	DINAS PERHUBUNGAN   UPTD PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR   SUB BAGIAN TU UPTD PERNGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
60	PENGELOLA PETERNAKAN	D-III PERTERNAKAN	-	1	DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN   BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN   SEKSI BINA PRODUKSI PETERNAKAN
61	PENGELOLA SARANA OLAHRAGA	D-III ADMINISTRASI PUBLIK / D-III ADMINISTRASI NEGARA / D-III ILMU PEMERINTAHAN / D-III EKONOMI MANAJEMEN	-	1	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA   BIDANG PEMBINAAN PEMUDA   SEKSI PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA PENDIDIKAN
62	PENGUJI LABORATORIUM TANAH, ASPAL, DAN BETON	S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN / S-I TEKNIK SIPIL	-	1	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN   UPTD PERALATAN PERBEKELAN DAN LABORATORIUM
63	PENYULUH KEPEMUDAAN	S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 SOSIOLOGI / S-1 EKONOMI MANAJEMEN	-	1	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA   BIDANG PEMBINAAN PEMUDA   SEKSI PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN PEMUDA
64	PENYULUH LINGKUNGAN HIDUP	S-1 TEKNIK LINGKUNGAN / S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN / S-1 GEOGRAFI LINGKUNGAN	-	1	DINAS LINGKUNGAN HIDUP   BIDANG KEBERSIHAN DAN PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU   SEKSI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
65	PENYULUH USAHA MANDIRI DAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 MANAJEMEN TEKNIK INFORMATIKA / S-1 EKONOMI MANAJEMEN / S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA / S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK	-	1	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH   BIDANG USAHA MIKRO   SEKSI FASILITASI LAYANAN DAN PEMBIAYAAN
66	PENYUSUN KEBUTUHAN BARANG INVENTARIS	S-1 EKONOMI MANAJEMEN / S-1 EKONOMI AKUNTANSI	-	1	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN   SEKRETARIAT DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN   SUB BAGIAN UMUM DAN

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	KETERANGAN TAMBAHAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI	UNIT KERJA PENEMPATAN
1	2	3	4	5	6
					KEPEGAWAIAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
67	PENYUSUN KEBUTUHAN BARANG INVENTARIS	S-1 EKONOMI MANAJEMEN / S-1 EKONOMI AKUNTANSI	-	1	DINAS PERMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA   SEKRETARIAT DINAS PERMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA   SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN DINAS PERMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
68	PENYUSUN KEBUTUHAN BARANG INVENTARIS	S-1 EKONOMI MANAJEMEN / S-1 EKONOMI AKUNTANSI	-	1	DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN   SEKRETARIAT DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN   SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN
69	PENYUSUN KEBUTUHAN BARANG INVENTARIS	S-1 EKONOMI MANAJEMEN / S-1 EKONOMI AKUNTANSI	-	1	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA   SEKRETARIAT DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA   SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
70	PENYUSUN KEBUTUHAN BARANG INVENTARIS	S-1 EKONOMI MANAJEMEN / S-1 EKONOMI AKUNTANSI	-	1	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH   SEKRETARIAT BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH   SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
71	PENYUSUN KEBUTUHAN BARANG INVENTARIS	S-1 EKONOMI MANAJEMEN / S-1 EKONOMI AKUNTANSI	-	1	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL   SEKRETARIAT DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL   SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
72	PENYUSUN KEBUTUHAN BARANG INVENTARIS	S-1 EKONOMI MANAJEMEN / S-1 EKONOMI AKUNTANSI	-	1	DINAS PERHUBUNGAN   SEKRETARIAT DINAS PERHUBUNGAN   SUB BAGIAN UMUM DAN

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	KETERANGAN TAMBAHAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI	UNIT KERJA PENEMPATAN
1	2	3	4	5	6
					KEPEGAWAIAN DINAS PERHUBUNGAN
73	PENYUSUN KEBUTUHAN BARANG INVENTARIS	S-1 EKONOMI MANAJEMEN / S-1 EKONOMI AKUNTANSI	-	1	SEKRETARIAT DPRD   BAGIAN UMUM   SUB BAGIAN RUMAH TANGGA
74	PENYUSUN KEBUTUHAN BARANG INVENTARIS	S-1 EKONOMI MANAJEMEN / S-1 EKONOMI AKUNTANSI	-	1	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA   SEKRETARIAT DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA   SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
75	PENYUSUN KEBUTUHAN BARANG INVENTARIS	S-1 EKONOMI MANAJEMEN / S-1 EKONOMI AKUNTANSI	-	1	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH   SEKRETARIAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH   SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
76	PENYUSUN KEBUTUHAN BARANG INVENTARIS	S-1 EKONOMI MANAJEMEN / S-1 EKONOMI AKUNTANSI	-	1	DINAS KEBUDAYAAN   SEKRETARIAT DINAS KEBUDAYAAN   SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN DINAS KEBUDAYAAN
77	PENYUSUN KEBUTUHAN BARANG INVENTARIS	S-1 EKONOMI MANAJEMEN / S-1 EKONOMI AKUNTANSI	-	1	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK   SEKRETARIAT BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK   SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

## B. KETENTUAN UMUM

1. Warga Negara Indonesia;
2. Usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun, khusus untuk jabatan Dokter Spesialis dapat berusia paling tinggi 40 tahun dihitung pada saat melamar (pendaftaran on-line);
3. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
4. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
5. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih atau kasus narkoba;
6. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai CPNS/PNS/Anggota TNI/Polri/pegawai swasta;
7. Tidak berkedudukan sebagai CPNS/PNS/Calon Anggota TNI/Polri serta Anggota TNI/Polri/Siswa Sekolah Ikatan Dinas Pemerintah;
8. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
9. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah.



### C. KETENTUAN KHUSUS

1. Pelamar yang mendaftar pada formasi jenis jabatan tenaga kesehatan yang mensyaratkan Surat Tanda Registrasi (STR), wajib melampirkan STR (bukan internship) sesuai jabatan yang dilamar (linier) yang **masih berlaku pada saat pendaftaran**, dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada Surat Tanda Registrasi (STR). Apabila STR masih dalam proses perpanjangan, maka harus melampirkan STR sebelumnya dan bukti perpanjangannya;
2. Tidak sebagai penerima Program Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis-Subspesialis dan/atau tidak sedang melaksanakan masa pengabdian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bagi pelamar disabilitas  
Formasi khusus disabilitas sebagaimana pada Rincian Formasi Huruf A hanya dapat dilamar oleh peserta penyandang disabilitas dengan persyaratan :
  - a. melampirkan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasnya; dan
  - b. menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktifitas sesuai Jabatan yang akan dilamar.
4. Pelamar penyandang disabilitas dapat melamar pada formasi umum sebagaimana pada Rincian Formasi Huruf B, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. pelamar dapat melamar pada Jabatan yang diinginkan jika memiliki ijazah yang kualifikasi pendidikannya sesuai dengan persyaratan Jabatan;
  - b. pada saat melamar di SSCASN, pelamar penyandang disabilitas wajib menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas;
  - c. pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dibuktikan dengan:
    - 1) dokumen/surat keterangan resmi dari rumah sakit pemerintah/Puskesmas yang menyatakan jenis dan derajat kedisabilitasnya; dan
    - 2) **video singkat** yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktifitas sesuai Jabatan yang akan dilamar.
  - d. penyandang disabilitas yang melamar pada kebutuhan umum berlaku Nilai Ambang Batas formasi umum.
5. Dalam hal pelamar penyandang disabilitas **tidak melampirkan** dokumen/surat keterangan yang menyatakan jenis dan derajat kedisabilitasnya, serta **tidak melampirkan** video yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktifitas sesuai Jabatan yang akan dilamar sampai batas akhir masa sanggah pengumuman hasil akhir seleksi, pelamar dinyatakan **tidak memenuhi syarat dan dibatalkan kelulusan/keikutsertaan dalam seleksi**.

### D. DOKUMEN PERSYARATAN

1. **Scan asli** Surat lamaran (Format Lampiran III), dengan ketentuan :
  - a. Surat lamaran ditujukan kepada Bupati Sleman;
  - b. Diketik/tulis tangan dengan tinta hitam dan ditandatangani.
3. **Scan asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau surat keterangan pengganti Kartu Tanda Penduduk** yang berlaku dan sesuai dengan yang tertera pada Ijazah;

4. **Scan asli Ijazah** (kualifikasi pendidikan sesuai dengan formasi yang dilamar), **surat keterangan lulus tidak berlaku**;
  - a. ijazah dari perguruan tinggi dalam negeri dan/atau program studi yang terakreditasi pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan/atau Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan/ Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah;
  - b. ijazah dari perguruan tinggi luar negeri yang telah disetarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi.
5. **Scan asli transkrip nilai**
  - a. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,00 (tiga koma nol nol)
  - b. Apabila transkrip nilai lebih dari 1 lembar, di scan semua
6. **Scan asli akreditasi universitas dan/atau program studi**

Akreditasi yang tercantum dalam ijazah dan/atau tangkapan layar (*screen shot*) sertifikat akreditasi program studi/perguruan tinggi yang diperoleh dari:

  - a. pangkalan data pendidikan tinggi yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi; atau
  - b. pangkalan data (database) Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
7. **Scan asli surat sehat jasmani dan rohani**

Surat sehat terdiri dari 2 (dua) buah surat, yaitu:

  - a. Surat sehat jasmani tertanggal Mei-Juli 2021 dan ditandatangani dokter dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah atau Swasta
  - b. Surat sehat rohani tertanggal Mei-Juli 2021 dan ditandatangani dokter spesialis jiwa dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah atau Swasta
8. **Scan asli surat pernyataan (Format Lampiran IV)**
  - a. Diketik/tulis tangan dengan tinta hitam, bermaterai 10.000 dan ditandatangani
  - b. Surat berisi, yaitu:
    - 1) Setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
    - 2) Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih;
    - 3) Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai CPNS/PNS/Anggota TNI/Polri/pegawai swasta;
    - 4) Tidak berkedudukan sebagai CPNS/PNS/Calon Anggota TNI/Polri serta Anggota TNI/Polri/Siswa Sekolah Ikatan Dinas Pemerintah;
    - 5) Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
    - 6) Bersedia ditempatkan pada instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman dan tidak mengajukan pindah sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun sejak TMT PNS.
9. **Scan asli pas foto** setengah badan dengan latar belakang merah;
10. **Scan asli surat tanda registrasi (bukan STR Internship)** yang masih berlaku;

11. **Bagi penyandang disabilitas:**

- a. **scan asli** dokumen/surat keterangan resmi dari rumah sakit pemerintah/Puskesmas yang menyatakan jenis dan derajat kedisabilitasannya; dan
- b. **upload video singkat** yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktifitas sesuai jabatan yang akan dilamar pada SSCASN.

**E. KETENTUAN SCAN DOKUMEN**

Semua dokumen pada huruf D (Dokumen Persyaratan) di scan asli, dengan ketentuan:

1. Format dan ukuran file sesuai yang diminta oleh aplikasi SSCASN;
2. Dokumen wajib terbaca jelas;
3. Dalam hal dokumen tidak asli (*fotocopy* di scan)/dokumen tidak terbaca/dokumen tidak lengkap/dokumen tidak sesuai ketentuan, panitia seleksi dapat menyatakan tidak memenuhi syarat administrasi.

**F. TATA CARA PENDAFTARAN**

1. Daftar Akun
  - a. Pelamar mengakses portal sscasn di <https://sscasn.bkn.go.id>
  - b. Membuat akun SSCASN
  - c. Login ke akun SSCASN yang telah dibuat
  - d. Lengkapi biodata dan unggah swafoto
2. Daftar Formasi
  - a. Pilih jenis seleksi
  - b. Pilih formasi
  - c. Unggah dokumen
  - d. Cek resume dan akhiri pendaftaran
  - e. Cetak kartu informasi akun dan kartu pendaftaran akun
3. Pelamar dapat mengikuti seleksi selanjutnya apabila dinyatakan lulus seleksi administrasi sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

Sleman, 30 Juni 2021

a.n. BUPATI SLEMAN

SEKRETARIS DAERAH

Selaku Ketua Panitia Seleksi Daerah

Pengadaan ASN Tahun 2021



H. HARDA KISWAYA, SE., M.Si

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 19640126 199303 1 004

LAMPIRAN II  
RINCIAN FORMASI DAN PERSYARATAN  
PENGADAAN PPPK TENAGA KESEHATAN

**A. RINCIAN FORMASI**

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI PPPK	KODE FASKES	UNIT PENEMPATAN
1	2	3	4	5	6
1	TERAMPIL - PERAWAT	D-III KEPERAWATAN	3	R3404011	RSUD SLEMAN
2	TERAMPIL - RADIOGRAFER	D-III RADIOLOGI/D-III TEKNIK RONTGEN/D-III RADIODIAGNOSTIK	1	R3404011	RSUD SLEMAN
<b>JUMLAH KESELURUHAN</b>			<b>4</b>		

**B. KETENTUAN UMUM**

1. Warga negara Indonesia;
2. Usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 57 (lima puluh tujuh) tahun pada saat melamar (pendaftaran online);
3. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana 2 (dua) tahun atau lebih;
4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
5. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
6. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
7. Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang;
8. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan jabatan yang dilamar.

**C. KETENTUAN KHUSUS**

1. Pelamar penyandang disabilitas dapat melamar pada jabatan yang diinginkan jika memiliki ijazah yang kualifikasi pendidikannya sesuai dengan persyaratan jabatan;
2. Pada saat melamar di SSCASN pelamar penyandang disabilitas wajib menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas, dibuktikan dengan :
  - a. dokumen/surat keterangan resmi dari rumah sakit pemerintah/Puskesmas yang menyatakan jenis dan derajat kedisabilitasiannya; dan
  - b. video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktifitas sesuai jabatan yang akan dilamar.
3. Dalam hal pelamar penyandang disabilitas **tidak melampirkan** dokumen/surat keterangan yang menyatakan jenis dan derajat kedisabilitasiannya, serta **tidak melampirkan** video yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan

aktifitas sesuai Jabatan yang akan dilamar sampai batas akhir masa sanggah pengumuman hasil akhir seleksi, pelamar **dinyatakan tidak memenuhi syarat dan dibatalkan kelulusan/keikutsertaan dalam seleksi.**

#### **D. DOKUMEN PERSYARATAN**

1. **Scan asli** Surat lamaran (Format Lampiran III), dengan ketentuan :
  - a. Surat lamaran ditujukan kepada Bupati Sleman;
  - b. Diketik/tulis tangan dengan tinta hitam dan ditandatangani.
2. **Scan asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau surat keterangan pengganti Kartu Tanda Penduduk** yang berlaku dan sesuai dengan yang tertera pada Ijazah;
3. **Scan asli Ijazah** (kualifikasi pendidikan sesuai dengan formasi yang dilamar), **surat keterangan lulus tidak berlaku;**
4. **Scan asli transkrip nilai**
  - a. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,00 (tiga koma nol nol)
  - b. Apabila transkrip nilai lebih dari 1 lembar, di scan semua
5. **Scan asli surat sehat jasmani dan rohani**

Surat sehat terdiri dari 2 (dua) buah surat, yaitu:

  - a. Surat sehat jasmani tertanggal Mei-Juli 2021 dan ditandatangani dokter dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah atau Swasta
  - b. Surat sehat rohani tertanggal Mei-Juli 2021 dan ditandatangani dokter spesialis jiwa dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah atau Swasta
6. **Scan asli surat pernyataan (Format Lampiran IV)**
  - a. Diketik/tulis tangan dengan tinta hitam, bermaterai 10.000 dan ditandatangani
  - b. Surat berisi 4 item, yaitu:
    - 1) Setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
    - 2) Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih;
    - 3) Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai ASN/Anggota TNI/Polri/pegawai swasta;
    - 4) Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis.
7. **Scan asli surat pengalaman kerja** paling singkat kumulatif 3 (tiga) tahun di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar, yang ditandatangani oleh:
  - a. Paling rendah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II) bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja pada instansi pemerintah; dan
  - b. Paling rendah Direktur/Kepala Divisi yang membidangi sumberdaya manusia (HRD) bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja pada instansi swasta/Lembaga swadaya nonpemerintah/Yayasan.
8. **Scan asli pas foto** setengah badan dengan latar belakang merah;
9. **Scan asli surat tanda registrasi (bukan STR Internship)** yang masih berlaku;

10. **Bagi penyandang disabilitas:**

- a. **scan asli** dokumen/surat keterangan resmi dari rumah sakit pemerintah/Puskesmas yang menyatakan jenis dan derajat kedisabilitasiannya;
- b. **upload video singkat** yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktifitas sesuai jabatan yang akan dilamar pada SSCASN.

**E. KETENTUAN SCAN DOKUMEN**

Semua dokumen pada huruf D (Dokumen Persyaratan) di scan asli, dengan ketentuan

1. Format dan ukuran file sesuai yang diminta oleh aplikasi SSCASN;
2. Dokumen wajib terbaca jelas;
3. Dalam hal dokumen tidak asli (*fotocopy* di scan)/dokumen tidak terbaca/dokumen tidak lengkap/dokumen tidak sesuai ketentuan, panitia seleksi dapat menyatakan tidak memenuhi syarat administrasi.

**F. TATA CARA PENDAFTARAN**

1. Daftar Akun
  - a. Pelamar mengakses portal sscasn di <https://sscasn.bkn.go.id>
  - b. Membuat akun SSCASN
  - c. Login ke akun SSCASN yang telah dibuat
  - d. Lengkapi biodata dan unggah swafoto
2. Daftar Formasi
  - a. Pilih jenis seleksi
  - b. Pilih formasi
  - c. Unggah dokumen
  - d. Cek resume dan akhiri pendaftaran
  - e. Cetak kartu informasi akun dan kartu pendaftaran akun
3. Pelamar dapat mengikuti seleksi kompetensi apabila dinyatakan lulus seleksi administrasi sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan

Sleman, 30 Juni 2021

a.n. BUPATI SLEMAN

SEKRETARIS DAERAH

Selaku Ketua Panitia Seleksi Daerah

Pengadaan ASN Tahun 2021



H. HARDA KISWAYA, SE., M.Si

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 19640126 199303 1 004

**A. FORMAT SURAT LAMARAN (PELAMAR CPNS)**

.....,..... 2021

Lampiran : 1 (satu) bendel  
Perihal : Lamaran CPNS

Kepada Yth.  
Bupati Sleman

di Sleman

Dengan hormat, saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **XXXXXXXXXXXX**  
Tempat,tanggal lahir : **XXXXXXXXXXXX**  
Pendidikan / Jurusan : **XXXXXXXXXXXX**  
Alamat : **XXXXXXXXXXXX**  
Nomor telepon : **XXXXXXXXXXXX**

Dengan ini mengajukan permohonan kepada Ibu, dengan harapan dapat diterima menjadi CPNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman pada jabatan **XXXXXXXXXXXX**. Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami sampaikan berkas lamaran dengan lampiran sebagai berikut :

1. Scan asli KTP (Kartu Tanda Penduduk) atau Surat Keterangan Pengganti KTP
2. Scan asli Pas Foto
3. Scan asli Ijazah
4. Scan asli Transkrip Nilai Akademik
5. Scan asli Surat keterangan sehat jasmani
6. Scan asli Surat keterangan sehat rohani/jiwa
7. Scan asli Surat Pernyataan
8. Scan/tangkap layar akreditasi Perguruan Tinggi dan/atau Prodi (jika dalam ijazah/transkrip tidak tercantum akreditasi)
9. Scan Surat Tanda Registrasi (STR) (*bagi pelamar tenaga kesehatan*)
10. Surat keterangan dokter dari dari dokter rumah sakit pemerintah/Puskesmas yang menerangkan jenis/tingkat dan derajat disabilitas (**khusus** bagi pelamar penyandang disabilitas)
11. Video Singkat keseharian (**khusus** bagi pelamar penyandang disabilitas)

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Hormat saya,

ttd

Nama pelamar

**B. FORMAT SURAT LAMARAN (PELAMAR PPPK)**

.....,..... 2021

Lampiran : 1 (satu) bendel  
Perihal : Lamaran PPPK

Kepada Yth.  
Bupati Sleman

di Sleman

Dengan hormat, saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : xxxxxxxxxxxx  
Tempat,tanggal lahir : xxxxxxxxxxxx  
Pendidikan / Jurusan : xxxxxxxxxxxx  
Alamat : xxxxxxxxxxxx  
Nomor telepon : xxxxxxxxxxxx

Dengan ini mengajukan permohonan kepada Ibu, dengan harapan dapat diterima menjadi PPPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman pada jabatan xxxxxxxxxxxx. Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami sampaikan berkas lamaran dengan lampiran sebagai berikut :

1. Scan asli KTP (Kartu Tanda Penduduk) atau Surat Keterangan Pengganti KTP
2. Scan asli Pas Foto
3. Scan asli Ijazah
4. Scan asli Transkrip Nilai Akademik
5. Scan asli Surat keterangan sehat jasmani
6. Scan asli Surat keterangan sehat rohani/jiwa
7. Scan asli Surat Pernyataan
8. Scan asli Surat pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun
9. Scan asli Surat Tanda Registrasi (**khusus** bagi formasi PPPK Tenaga Kesehatan)
10. Surat keterangan dokter dari dari dokter rumah sakit pemerintah/Puskesmas yang menerangkan jenis/tingkat dan derajat disabilitas (**khusus** bagi pelamar penyandang disabilitas)
11. Video Singkat keseharian (**khusus** bagi pelamar penyandang disabilitas)

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Hormat saya,

ttd

Nama pelamar



**A. FORMAT SURAT PERNYATAAN (PELAMAR CPNS)**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

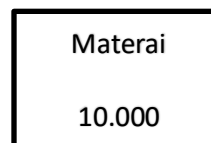
Nama : **XXXXXXXXXXXX**  
Tempat,tanggal lahir : **XXXXXXXXXXXX**  
No. KTP : **XXXXXXXXXXXX**  
Alamat : **XXXXXXXXXXXX**  
Nomor telepon : **XXXXXXXXXXXX**

menyatakan bahwa saya :

1. Setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih;
3. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai ASN/Anggota TNI/Polri/pegawai swasta;
4. Tidak berkedudukan sebagai ASN/Calon Anggota TNI/Polri serta Anggota TNI/Polri/Siswa Sekolah Ikatan Dinas Pemerintah;
5. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
6. Bersedia ditempatkan pada instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman dan tidak mengajukan pindah sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun sejak TMT PNS.

Apabila dikemudian hari terdapat pernyataan saya yang tidak sesuai, saya bersedia untuk mempertanggungjawabkan sesuai peraturan yang berlaku.

Hormat saya,



ttd

Nama pelamar

**B. FORMAT SURAT PERNYATAAN (PELAMAR PPPK)**

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

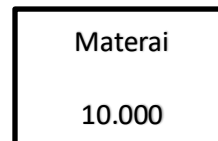
Nama : **XXXXXXXXXXXX**  
Tempat,tanggal lahir : **XXXXXXXXXXXX**  
No. KTP : **XXXXXXXXXXXX**  
Alamat : **XXXXXXXXXXXX**  
Nomor telepon : **XXXXXXXXXXXX**

menyatakan bahwa saya :

1. Setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih;
3. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai ASN/Anggota TNI/Polri/pegawai swasta;
4. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis.

Apabila dikemudian hari terdapat pernyataan saya yang tidak sesuai, saya bersedia untuk mempertanggungjawabkan sesuai peraturan yang berlaku.

Hormat saya,



ttd

Nama pelamar